BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. *Islam dan Demokrasi*

Islam merupakan agama paripurna yang ajarannya memberi panduan nilai atau prinsip-prinsip etik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan para pemeluknya. Dalam konteks kehidupan personal, Islam memberi panduan nilai atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembentukan *al-Insan al-Kamil*. Prinsip dan nilai-nilai inilah yang harus digunakan sebagai panduan dalam membentuk dan mengarahkan pribadi setiap Muslim agar menjadi manusia yang matang dan sehat kepribadiannya *(mature and healthy personality)*.

Bila kehidupan personal berkaitan dengan pembinaan diri dan kepribadian individu Muslim, maka dalam konteks kehidupan sosial, Islam memberi panduan nilai atau prinsip-prinsip etik yang antara lain berkaitan dengan keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi sebagai landasan atau asas bagi menata kehidupan sosial yang damai, harmoni, bahagia, dan sejahtera. Dalam konteks ini, Islam tidak menggariskan suatu pola baku tentang sistem dan bentuk institusi sosial atau pemerintahan negara, tetapi memuat nilai-nilai intrinsik atau prinsip-prinsip etik yang harus diaplikasikan dalam menata kehidupan sosial dan kenegaraan. Karena itu, istilah pemerintahan demokrasi tidak pernah dijumpai dalam sumber asasi ajaran Islam, baik al-Qur'an maupun Hadits. Namun, hal itu bukan berarti bahwa Islam tidak mengenal dan memiliki gagasan tentang demokrasi. Sebab, bila ditelaah secara cermat, ternyata al-Qur'an dan

Hadits memuat prinsip-prinsip etik yang nilainya sebanding dengan esensi dan karateristik dari suatu masyarakat atau pemerintahan yang demokratik.

Implementasi dari nilai-nilai intrinsik atau prinsip-prinsip etik tersebut bisa dilihat dari praktik nabi Muhammad Saw pada saat beliau membangun negara-kota *(nation-state)* di Madinah. Ketika itu, nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi dijadikan Muhammad Saw sebagai asas atau landasan dalam menata dan membangun masyarakat dan negara Madinah. Nabi Saw memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *syari`ah* Islam dalam seluruh dimensi kehidupan.

Bila ditilik dari proses pemilihan kepemimpinan, meskipun sebagai seorang rasul, Muhammad Saw memperoleh kekuasaan politik *(political power)* sebagai pemimpin negara Madinah bukan melalui kudeta ataupun penunjukan langsung oleh Tuhan. Kepindahan beliau ke Madinah bukanlah atas kehendaknya sendiri dan bukan sekedar didukung oleh petunjuk Tuhan, tetapi atas undangan dan permintaan sejumlah kelompok terpenting penduduk Madinah yang kemudian bersepakat untuk menjadikan Muhammad Saw sebagai pemimpin tertinggi mereka (lihat Madjid, 1999:59). Karenanya, kepemimpinan politik sebagai kepala negara Madinah bukan merupakan posisi yang 'dihadiahkan' Tuhan atau permohonan pribadi Muhammad Saw, tetapi diperolehnya melalui kesepakatan yang didapat dari *bai`at Aqabah*. Dalam bahasa Arab, kata *bai`at* merupakan varian dari kata *ba`i* yang berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli. Karenanya, kata *bai`at* bisa berarti suatu kesepakatan kontraktual antara yang memberi kuasa (masyarakat Madinah) dengan yang diberi kuasa (Nabi

Saw) di mana keduanya sama-sama menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Berdasarkan kesepakatan kontraktual tersebutlah akhirnya nabi Muhammad Saw mendeklarasikan Piagam Madinah *(The Constitution of Medina)*, yakni undang-undang negara yang mengatur kehidupan bersama secara adil, terbuka, dan demokratis dengan dasar taqwa kepada Allah Swt (Bdk. Sukron, 2002:89).

Dalam sejarah Islam awal, praktik demokrasi tidak hanya bisa dilihat dari proses pemilihan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas. Ketika menjadi kepala negara Madinah, Muhammad Saw mempraktikkan demokrasi Islam tersebut dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam konteks idiologi *(aqidah)*, Muhammad Saw mengajarkan ketundukan mutlak seorang Muslim kepada Allah Swt, dan bukan kepada sesama manusia. Hal ini merupakan penentangan Islam terhadap tirani dan kesewenangan manusia atas manusia lainnya. Sebab, dalam Islam, manusia semuanya adalah sama. Kemudian dalam dimensi politik, Muhammad Saw mempraktikkan sistem pemerintahan yang adil (tidak *zhalim)*, jujur *(amanah)*, terbuka, akuntabel *(mas'uliyah)* dan merakyat. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, Muhammad Saw mengamalkan prinsip pemerataan kekayaan dan sumber-sumber daya alam -- melalui pelaksanaan *zakat, infaq, shadaqah*, dan lain-lain -- untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan warga masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya dalam dimensi sosial, Muhammad Saw telah mendemonstrasikan interaksi sosial yang didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, kerjasama, toleransi, dan nilai-nilai luhur lainnya. Seterusnya dalam dimensi budaya, Muhammad Saw telah mempraktikkan dan memberi petunjuk tentang bagaimana idealnya

setiap Muslim merasa, berpikir, bertindak, berkreasi, dan menciptakan peradaban untuk memajukan kebudayaannya.

Meskipun sumber-sumber asasi Islam tidak memuat istilah demokrasi dan meskipun umat Islam hanya memiliki pengalaman empirik yang terbatas dalam mempraktikkan demokrasi, namun fakta historis telah menunjukan bagaimana Muhammad Saw dan empat pemimpin umat Islam sesudahnya, yaitu *khulafa' al-Rasyidin,* mengaktualisasikan nilai-nilai intrinsik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Nilai-nilai yang dipraktikkan tersebut merupakan kata kunci dalam penataan sistem sosial dan kenegaraan umat Islam pada masa-masa awal. Memang sangat disayangkan, setelah era Muhammad Saw dan *khulafa' al-Rasyidin,* praktis dapat dinyatakan bahwa demokrasi Islam itu hanya tinggal dokumen teoritik. Meskipun dalam aspek-aspek tertentu umat Islam masih tetap mempraktikkan sistem demokrasi, seperti musyawarah dan kebebasan dalam menuntut ilmu, namun sistem pemerintahan yang dipraktikkan umat Islam berubah bentuk menjadi sistem pemerintahan dinasti dan kerajaan. Karenanya dapat ditafsirkan bahwa meskipun secara normatif Islam memiliki prinsip atau nilai-nilai dasar tentang demokrasi, namun prinsip atau nilai-nilai tersebut belum mampu diaktualisasikan umat Islam dalam seluruh dimensi kehidupannya.

2. *Realitas Praktik Demokrasi di Indonesia*

Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan diri sebagai bangsa dan negara demokrasi. Bangsa Indonesia sepakat bahwa kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus diatur dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,

dan untuk rakyat *(government of the people, by people, and for people).* Secara eksplisit, dasar negara -- Pancasila -- memuat nilai-nilai intrinsik yang berkaitan dengan kehidupan beragama, persatuan bangsa, kemanusiaan yang beradab, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Sementara *preambule* UUD 1945 memuat pula nilai-nilai kedaulatan, kemerdekaan, kebebasan dan perdamaian sebagai asas bagi menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun -- dalam perjalanan historis bangsa Indonesia -- praktik demokrasi tersebut telah mengalami pasang surut atau fluktuasi. Indikasi yang cukup jelas dari fluktuasi tersebut adalah dikenalnya sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Masing-masing pemerintahan dengan sistem tersebut telah menginterpretasi dan mempraktikkan demokrasi secara berbeda. Karena itu, di samping hal-hal yang bersifat positif, muncul pula hal-hal negatif yang merupakan diskrepansi antara esensi demokrasi dengan pelaksanaan-nya di lapangan.

Pada dasarnya, esensi demokrasi terletak pada pemuliaan harkat dan martabat kemanusiaan manusia *(human dignity).* Harkat dan martabat itu merupakan karunia Allah Swt yang diberikan kepada manusia. Semua manusia telah dianugerahi Allah Swt potensi untuk beragama, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk memilih dan berbuat, persamaan kemanusiaan dan kedudukan yang lebih mulia bila dibanding makhluk lainnya. Dalam konteks ini, apapun label yang dilekatkan pada sistem demokrasi yang dikembangkan, selama sistem itu tetap memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan manusia, maka ia sebenarnya layak disebut sebagai sistem yang demokrasi. Sebaliknya, jika sistem itu tidak menghormati dan tidak pula

memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan manusia, maka sistem itu pada dasarnya bukanlah sistem yang demokratis.

Adalah merupakan fakta historis yang tidak dapat diingkari bahwa sejak kemerdekaan 1945, pelaksanaan demokrasi oleh beberapa generasi kepemimpinan nasional telah membawa sejumlah kemajuan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, baik dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Namun, karena demokrasi bukanlah merupakan 'barang yang sudah jadi', tetapi merupakan hasil perkembangan bertahap dari sebuah proses dan alat perjuangan kekuasaan (lihat Chamarik, 1993:49), maka sudah pasti ditemukan sejumlah kekurangan dan titik-titik kelemahannya. Karenanya, adalah wajar, manakala muncul kritik dari sejumlah kalangan terhadap pemerintah yang berkuasa berkaitan dengan praktik demokrasi dan hasil-hasil yang dicapainya. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa merespon secara positif kritik tersebut, maka proses-proses ke arah kehidupan yang demokratis sebenarnya masih terus berjalan. Tetapi ketika pemerintah memberi respon sebaliknya, maka akan muncul perlawanan yang menyebabkan terjadinya krisis politik dan pemerintahan. Ketika hal ini terus dibiarkan, maka yang terjadi kemudian adalah 'inflasi', bahkan mungkin mematikan demokrasi itu sendiri.

Dalam kasus Indonesia, harus diakui bahwa pemerintahan Orde Baru yang terkenal dengan strategi penciptaan stabilitas keamanan untuk menunjang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pada awalnya telah bergerak ke arah mengembangkan dan memajukan kehidupan demokrasi. Namun dalam perjalanan berikutnya, strategi itu berubah menjadi penciptaan situasi dan kondisi yang ingin melanggengkan kekuasaan *(status quo)*. Penyederhanaan jumlah

partai politik, proses rekrutmen wakil rakyat yang bersifat ekslusif, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, undang-undang yang bersifat represif, kepemimpinan yang otoriter, dan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi telah menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketika Orde Baru 'runtuh', rasa ketidakpuasan dan kegoncangan itu ternyata terus berlanjut dan menimbulkan ketidak-stabilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa.

Hampir dapat dikemukakan bahwa sendi-sendi kehidupan masyarakat -- khususnya sejak tahun 1997 -- selalu diwarnai oleh konflik-konflik internal yang menyebabkan berlarut-larutnya bangsa Indonesia berada dalam badai krisis multi dimensi. Dari dimensi politik, perdebatan dan pertikaian antar politisi dan parpol telah mengakibatkan ketidakpastian politis dalam menyelesaikan berbagai persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Dari dimensi sosial, kerusuh-an dan pertikaian antar etnis di berbagai daerah telah memunculkan rasa tidak aman dan terjadinya pelanggaran hak-hak azasi manusia. Dari dimensi hukum, lemahnya komitmen dan penegakan hukum telah menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi pengadilan dan lembaga-lembaga penyelenggara negara. Dari dimensi ekonomi, berbagai kasus kejahat-an ekonomi dan tidak meratanya hasil-hasil pembangunan telah menyebabkan semakin panjangnya penderitaan rakyat miskin dan tidak mampunya mereka bangkit dari keterpurukan.

Dalam konteks kehidupan beragama, fenomena empirik juga masih memperlihatkan bahwa tingkat kesalehan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ajaran agamanya tampak baru berada pada level simbolik-formal. Terdapat diskrepansi yang lebar antara

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

pengamalan ritual-formal dengan sikap dan perilaku sosial. Ibadah [illegible] yang dilaksanakan belum memberi dampak yang berarti bagi penciptaan iklim kehidupan sosial yang aman, damai, harmoni, bahagia, dan sejahtera. Sejumlah peristiwa kerusuhan dan konflik sosial yang bernuansa agama merupakan indikasi yang kuat betapa pengamalan ajaran agama belum menyentuh dan mencapai tingkat kesalehan sosial. Contoh kongkrit untuk hal ini adalah kerusuhan dan konflik sosial di Maluku dan Ambon. Meskipun jelas konflik tersebut tidak bisa direduksi apalagi disebut semata-mata konflik antar umat beragama, namun dalam kenyataannya, konflik tersebut jelas-jelas menghadapkan dua komunitas umat beragama (Islam dan Kriten) dalam tindak kekerasan yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu.

Dalam skala yang lebih luas, belum dicapainya kesalehan sosial dapat ditandai dengan pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma agama yang semakin meningkat. Maraknya ketidakadilan, korupsi, dan dekadensi moral merupakan fenomena yang cukup jelas untuk menggambarkan pemahaman yang masih dangkal terhadap ajaran agama dan tidak terinternalisasinya nilai-nilai ajaran agama dalam diri dan kepribadian masyarakat. Dalam konteks Islam, masyarakat Muslim Indonesia tampaknya masih banyak yang mempersepsi agama hanya sebatas *syari`ah* dalam arti ritual-formal. Agama seakan-akan direduksi menjadi urusan *ukhrawi* dan personal belaka, sehingga pengamalan *syari`ah* kurang atau bahkan tidak menyentuh kawasan duniawi dan kehidupan sosial yang berdimensi luas. Karenanya, tidak mengherankan jika suatu komunitas umat beragama belum mampu hidup berdampingan secara damai, harmoni, dan toleran dengan penganut agama lainnya.

Fenomena kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi politik, sosial, hukum, ekonomi, dan agama sebagaimana dikemukakan di atas, dari satu sisi sebenarnya merupakan konsekuensi dari sistem pemerintahan yang bersifat elitis, otoriter, dan jauh dari nilai-nilai demokrasi yang dipraktekkan selama ini. Selama masa Orde Baru -- kurang lebih 32 tahun -- peran legislatif, eksekutif dan yudikatif lebih cenderung berada pada 'satu tangan'. Sistem pemerintahan yang terlalu birokratik dan sentralistik menyebabkan terjadinya monoloyalitas sehingga pada gilirannya rakyat tidak berani untuk mengambil inisiatif dan prakarsa, mengemukakan gagasan dan berbeda pendapat, mengoreksi kekeliruan atau kesalahan, dan memperjuangkan apa-apa yang sebenarnya merupakan hak-hak mereka sebagai individu, anggota masyarakat, maupun warga negara. Baru pada tahun 1998 terjadi perubahan dramatis dalam sistem pemerintahan. Setelah sekian lama ditekan, rakyat bergerak melakukan perlawanan yang puncak dari perlawanan tersebut adalah jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru oleh 'gerakan reformasi'. Dalam konteks ini, munculnya gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dalam berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan bisa dinyatakan sebagai antitesa dan perlawanan terhadap sistem pemerintahan negara yang elitis dan otoriter.

Di samping membawa sejumlah sisi positif, dalam perjalanannya, ternyata gerakan reformasi juga menimbulkan sejumlah ekses negatif terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Ekses tersebut disebabkan kekurangsiapan masyarakat dan bangsa ini untuk hidup berdemokrasi. Akibatnya, reformasi yang baru saja dikerjakan mendatangkan kekikukan dan kegagapan dari hampir semua kalangan. Dalam wujudnya yang konkrit, menurut Eep (2000:xxvii), kekikukan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

dari kegagapan itu mewujud dalam euforia -- lonjakan semangat dan kebebasan yang tidak terkendali -- di mana-mana. Terlalu lamanya hak-hak rakyat 'dipasung' merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya euforia tersebut; sehingga ketika kran kebebasan dibuka, ibarat limbah yang telah tertahan lama, air langsung mengalir dengan deras dan membobol serta merusak benteng dan parit yang mengalirinya. Reformasi kemudian dipahami sebagai kebebasan untuk berbuat apa saja tanpa keteraturan, sehingga sebagaimana dinyatakan Davis dan Meyer (2000:126), kebebasan yang tidak diseimbangkan dengan keteraturan sangat potensial mendorong ke arah tirani atau kesewenangan.

3. *Peran Pendidikan dalam Mengembangkan Nilai dan Kultur Demokrasi*

Tatanan kehidupan yang demokrasi tentu saja membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya tetap tegak dan kokoh *(establish)*. Kultur demokrasi itu sendiri merupakan nilai-nilai sentral yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Semakin tinggi tingkat apresiasi dan pengamalan nilai-nilai tersebut, maka akan semakin tumbuh subur perkembangan demokrasi dalam masyarakat tersebut. Untuk itu, suatu masyarakat memerlukan instrumen yang dapat digunakan bagi mewariskan dan mengembangkan nilai-nilai dan kultur demokrasi kepada generasi mudanya.

Dalam perspektif demokrasi, instrumen yang lazim dikenal sebagai pembawa, penyalur, dan sekaligus pengembang nilai dan kultur demokrasi adalah partai-partai politik *(political parties)*. Dalam konteks ini, para politisi dan pemimpin negara merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat agar

memahami, menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai dan budaya demokrasi dalam kehidupan. Karena itu, maju mundurnya demokrasi pada suatu masyarakat dan bangsa juga sangat bergantung pada sejauh mana *political parties* memberikan pendidikan demokrasi kepada konstituen dan warga masyarakat.

Selain partai-partai politik, institusi yang berpotensi besar dalam memberikan pemahaman dan mendidikkan nilai dan kultur demokrasi kepada masyarakat adalah institusi pendidikan. Pendidikan bisa memainkan sebuah peran penting dalam mendidik dan 'melatih' masyarakat untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggungjawab dalam mempraktikkan demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan sarana vital untuk menumbuh kembangkan nilai dan kultur demokrasi, dikarenakan pendidikan berhubungan dengan proses penyampaian, penanaman dan pengembangan nilai-nilai. Karenanya, pendidikan juga merupakan *political institution.* Melalui pendidikan akan dihasilkan warga negara yang bebas, mandiri, kritis, dan memahami prinsip-prinsip demokrasi. Lewat pendidikan seseorang dididik untuk berdisiplin, bertanggung jawab, berpikir kritis, menghargai harkat dan martabat manusia, jujur, terbuka, toleran, taat pada hukum, apresiatif terhadap perbedaan pendapat, mampu mengambil keputusan terbaik untuk diri dan masyarakatnya.

Jika institusi pendidikan berhasil menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, maka suatu masyarakat bisa berharap kehidupan bangsanya di masa depan akan berkembang ke arah yang demokratis. Sebab, peserta didik yang berasal dari berbagai institusi pendidikan itulah nantinya yang akan hidup dan mengambil peran dalam kehidupan masa depan. Akan tetapi, jika institusi

pendidikan gagal dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, maka kehidupan masyarakat akan merosot kembali ke arah masyarakat feodalistik, autokratis, dan otoriter (Bukhari, 2001:65).

Suatu hal yang harus diingat adalah bahwa sebelum institusi pendidikan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya, maka sistem dan praktik-praktik yang dikembangkan dalam institusi pendidikan haruslah merupakan sistem dan praktik yang demokratis. Ketiadaan sistem dan praktik yang demokrasi pada institusi pendidikan, akan memperlemah dan menyebabkan ketidakmampuan untuk menciptakan generasi yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Karenanya, pemerintah tidak boleh menginter-vensi dan 'memasung' kebebasan institusi-institusi pendidikan dalam mengembangkan sistem dan praktik demokrasi.

Bila dicermati, salah satu penyebab utama kekurang mampuan dan kegagalan institusi pendidikan dalam mengajarkan dan menanamkan kultur dan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat adalah disebabkan intervensi politik ke dalam dunia pendidikan. Menurut Bukhari (2001:62), mulai tahun 1963, lembaga-lembaga pendidikan kita mulai digerogoti oleh sistem birokrasi yang berwatak politis. Kemudian sejak 1978, muncul suasana yang sangat restriktif, yang pada dasarnya mengatakan bahwa yang boleh berpikir hanya birokrasi pendidikan saja. Birokrasilah yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan pendidikan Indonesia. Sejak saat itu, para guru dan petugas pendidikan lainnya merosot derajatnya menjadi sekedar pelaksana dari segala sesutu yang telah diputuskan oleh birokrasi.

Apa yang dikemukakan di atas telah menyebabkan institusi-institusi pendidikan belum berhasil -- andaikata tidak bisa dikatakan gagal -- mengembangkan nilai-nilai demokrasi, seperti kesopansantunan, egaliter, terbuka, saling pengertian, tanggung jawab, disiplin, kebersamaan, dan penghormatan terhadap martabat dan hak-hak azasi manusia. Menurut Maarif (Zamroni, 2000:ix), realitas sejarah di Indonesia menunjukkan betapa institusi pendidikan dijadikan 'alat' untuk melanggengkan kekuasaan. Sistem pendidikan yang bersifat sentralistik dan menekankan uniformitas ternyata telah 'mematikan' keberanian para peserta didik untuk mengambil inisiatif dan prakarsa, tidak berani mengajukan pendapat dan menanggung resiko, tidak siap berargumentasi dan berbeda pendapat, dan tidak mampu hidup bersama dalam suasana keberagaman. Mencermati hal ini, Suparmo (2000:79) bahkan menyatakan bahwa pendidikan kita masih banyak menghasilkan manusia yang ikut-ikutan emosional dalam menghadapi persoalan masyarakat, mudah berkelahi dan berperang, menjarah orang lain, dan sulit menghargai gagasan yang berbeda. Mereka belum dapat hidup berdemokrasi dengan orang lain. Karenanya, sejak bergulirnya proses reformasi justru terjadi berbagai kasus tindak kekerasan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, dan kecenderungan kurang mampunya masyarakat untuk hidup bersama dalam suasana kebebasan dan demokrasi.

Mencermati paparan di atas, maka ada pertanyaan yang cukup signifikan untuk direnungkan, yaitu apakah institusi pendidikan kita masih dapat diharapkan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis yang dapat hidup dalam suasana kebebasan dan kebersamaan dalam 'desa global' ? Apakah kita masih mau memberikan konstribusi pada kehidupan publik dan bagaimana kita dapat melakukannya ?

Pertanyaan ini, sebagaimana dinyatakan Dellors (1996:16), bersifat sentral pada demokrasi.

Dalam konteks menjawab pertanyaan di atas, Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk Abad XXI (1996:13) masih melihat pendidikan sebagai suatu instrumen penting yang sangat dibutuhkan dalam usaha meraih cita-cita perdamaian, kemerdekaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Pendidikan pada dasarnya adalah institusi di mana individu dan masyarakat dibentuk, dibina, dan dikembangkan agar menjadi individu, warga masyarakat, warga bangsa, dan warga dunia yang baik *(good citizenship)*. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, *Asia-Pacific Network of International Education and Values Education/APNIEVE* (2000) merekomendasi perlunya dipromosikan dan dikembangkan pendidikan internasional dan pendidikan nilai. Salah satu dimensi pendidikan internasional dan pendidikan nilai tersebut adalah **demokrasi** yang merujuk pada *learning to be, learning to know, learning to do,* dan *learning to live together,* dengan memberikan tekanan kuat pada *learning to live together.*

4. Potret Pembelajaran pada Fakultas Tarbiyah IAIN-SU

Menciptakan generasi masa depan agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mempraktikkan demokrasi, sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh institusi pendidikan. Dalam konteks institusi formal, IAIN sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia, selayaknya berperan aktif dalam memberikan seperangkat pengetahuan teoritis dan praktis mengenai nilai-nilai demokrasi bagi para mahasiswanya. Dengan nilai-nilai demokrasi itu, diharapkan mereka nantinya dapat menjalani kehidupan bersama dengan baik dalam komunitas masyarakat Indonesia yang

majemuk. Upaya ini sangat penting, terutama mencermati bahwa tugas IAIN sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, tidak hanya ditujukan untuk memproduk lulusan yang ahli dalam ilmu agama *an sich*, seperti *syari'ah, ushuluddin,* dan *dakwah,* tetapi melalui sejumlah jurusan yang ada di Fakultas Tarbiyah, seperti PAI, IAIN juga diharapkan mampu memproduk calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan Islam yang akan bertugas di berbagai lembaga pendidikan Islam. Selain ilmu-ilmu kependidikan dan keislaman, sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan, para mahasiswa juga harus dibekali dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi Islam. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dipraktekkan dan pada gilirannya ditransformasikan kepada anak didik di mana mereka bertugas nantinya, sehingga akhirnya suasana kehidupan di berbagai institusi pendidikan Islam akan diwarnai dengan nilai-nilai demokrasi sebagai salah satu bentuk pengamalan *syari`at* Islam, khususnya dalam penegakan *al-Akhlaq al-Karimah.*

Kendati demikian, pengamatan sepintas menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang selama ini dipraktikkan pada sejumlah IAIN tampaknya belum begitu kondusif bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Azra (1999:163) menyatakan bahwa interaksi ilmiah antara dosen dengan mahasiswa boleh dikatakan masih jauh dari pada memuaskan. Masih banyak dosen yang belum berpegang pada standar-standar ilmiah, tetapi justru pada birokrasi dan lebih parah lagi mungkin feodalisme. Seiring dengan itu, Abdillah (1997:16) menyatakan bahwa proses belajar mengajar di IAIN justru masih menitik beratkan pada bentuk pengajaran dengan pendekatan norma-

tif yang kurang menunjang kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Pendekatan pembelajaran yang selama ini dipraktekkan di IAIN lebih dominan berpusat pada pendidik atau dosen. Bahkan menurut Fadhil (1998), keterikatan pada masa lalu masih mendominasi proses pembelajaran mahasiswa dan sedikit sekali perhatian dalam mentransfer metodologi yang adaptif yang bisa digunakan untuk merespons berbagai permasalahan masa kini. Proses pembelajaran seperti ini hemat peneliti masih cenderung menggunakan apa yang disebut Freire (2000:49-70) sebagai pendidikan gaya bank *(the banking system)*. Dalam sistem ini, para pendidiklah yang paling aktif, paling tahu, dan paling berkuasa menentukan segalanya bagi peserta didik. Peserta didik diperlakukan seperti deposit, tempat dimana para deposan menyimpan atau menitipkan uangnya. Sistem ini tentu tidak kondusif bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi. Padahal untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia, demokrasi adalah prasyarat yang sangat penting bagi mewujudkan suasana kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan agar muncul saling pengertian *(mutual understanding)*, saling menghormati *(mutual respect)*, dan keharmonisan *(harmony)*.

Apa yang dikemukakan di atas, ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi objektif yang terjadi pada sejumlah jurusan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, termasuk PAI. Penelitian yang dilakukan Nasution (2000) menyimpulkan bahwa sistem belajar di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara lebih mengandalkan aspek hafalan, sehingga hanya keterampilan mengikuti pelajaran dan keterampilan mempersiapkan ujian yang diperlukan, sementara keterampilan membaca buku, mengerjakan tugas, menulis makalah, belajar kelompok, dan mencari sumber-sumber bahan belajar lainnya

kurang diperhatikan. Bahkan dinyatakan bahwa sistem belajar yang cenderung bersumber dari diktat menyebabkan rendahnya kreatifitas mahasiswa untuk berkreasi dan menerapkan cara-cara belajar yang kondusif bagi peningkatan prestasi belajarnya.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERPUSTAKAAN

5. *Pendekatan Inkuiri Untuk Mengembangkan Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan Islam*

Mencermati kondisi pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu adanya upaya konkrit dalam bentuk aplikasi berbagai pendekatan pembelajaran yang kondusif, khususnya untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Hal ini penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya Fakultas Tarbiyah untuk mempersiapkan calon pendidik dan tenaga kependidikan Islam agar mereka memiliki keterampilan dalam mengelola proses pembelajaran di masyarakat dan berbagai lembaga pendidikan Islam nantinya. Dalam proses kependidikannya, calon-calon pendidik dan tenaga kependidikan Islam tersebut, selain harus menerima pengajaran di dalam kelas, sebaiknya harus dilibatkan dengan sejumlah aktivitas belajar di luar kelas formal agar mereka mendapatkan pengalaman langsung yang berkaitan dengan bidang tugas yang akan diembannya. Dalam konteks inilah, hemat penulis, perlu diterapkan pendekatan inkuri sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang harus digunakan di samping sejumlah pendekatan lainnya guna mendidik dan melatih mahasiswa untuk mengembang-kan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Dengan inkuiri, para mahasiswa sebagai calon pendidik akan berinteraksi dan bersentuhan secara langsung dengan berbagai fenomena dan persoalan demokrasi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan pencarian dan temuannya diharapkan mereka dapat

mengembang-kan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam untuk selanjutnya dipraktikkan dan dikembangkan di berbagai lembaga pendidikan Islam di mana mereka bertugas nantinya.

Secara umum, inkuiri adalah sebuah kerangka kerja terstruktur *(a structured framework)* yang akan membantu mahasiswa memahami berbagai permasalahan dan melengkapi sejumlah pendekatan pembelajaran lainnya yang selama ini diterapkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Dengan inkuiri, mahasiswa akan distimulasi untuk mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi masalah, mengajukan hipotesis, bersentuhan langsung dengan berbagai fenomena kehidupan demokrasi di madrasah, menganalisis dan memecahkan masalah, memformulasi kesimpulan dan mengkritisi atau menguji kembali kesimpulan tersebut. Melalui inkuiri, mahasiswa dilatih dan dibimbing untuk aktif dan partisipatif dalam memecahkan suatu masalah, baik dengan cara meneliti langsung ke lapangan, mengumpulkan dan menganalisis data, menguji hipotesa, teori atau generalisasi, memformulasi dan menguji kesimpulan sehingga mereka memahami bagaimana proses mengkonstruksi, merevisi, dan meruntuhkan suatu gagasan atau konsep ilmu pengetahuan. Selain itu, dengan pembelajaran inkuiri, mahasiswa tidak hanya dilibatkan dengan sejumlah operasi intelektual, tetapi juga mengembangkan seperangkat nilai-nilai, seperti mencari atau mengejar kebenaran, kejujuran, berpikir jernih, empati, otonomi, tanggung jawab, kebersamaan, *self-critique*, dan lain-lain. Dengan melakukan inkuiri, mahasiswa tidak hanya terlibat dalam operasi intelektual yang bersifat kognitif, tetapi juga psikomotorik dan afektif, yakni dimensi pendidikan yang terkait erat dengan kepribadian dan nilai-nilai.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran yang menggunakan inkuiri berdampak positif terhadap *performance* atau kinerja peserta didik. Joyce, Weil dan Calhoun (2000:176) telah memaparkan beberapa studi perihal keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan inkuiri. Di antaranya, penelitian Schlenker (1976) yang melaporkan bahwa pembelajaran dengan inkuiri telah meningkatkan pemahaman peserta didik tentang sains, produktif dalam berpikir kreatif, dan terampil dalam mencari dan menganalisis informasi. Ivany (1969) dan Collins (1969) melaporkan bahwa inkuiri merupakan metode kerja terbaik ketika peserta didik dihadapkan dengan tantangan, berbagai masalah yang pelik, dan mengeksplorasi suatu topik dari bahan pelajarannya. Sedangkan Elefant (1980) melalui studinya melaporkan bahwa inkuiri ternyata merupakan model pembelajaran yang sangat berhasil diterapkan di kalangan anak-anak yang tuli *(deaf children)*, sehingga ia merekomendasikan agar inkuiri digunakan sebagai metode pembelajaran bagi para peserta didik yang mengalami berbagai hambatan sensori yang berat *(severe sensory handicaps)*.

Penelitian yang dilakukan Muir dalam Cleaf (1991:190) menunjukkan bahwa pendekatan inkuiri berdampak positif terhadap peningkatan keterlibatan aktif para pelajar dalam proses pembelajar-an. Kemudian Thomas dan Oldfather (Sapriya, 1996) yang melakukan studi tentang pembelajaran sastra yang mengguna-kan pendekatan inkuiri menemukan bahwa para pelajar secara inheren termotivasi dan secara natural terbantu dalam belajar. Selanjutnya Sapriya (1996) dalam studinya di *Victorian Primary School* menemukan bahwa keuntungan penerapan inkuiri adalah memberikan beberapa keteram-

pilan sosial, keterampilan belajar, dan keterampilan berpikir kepada peserta didik.

Putrayasa (2001) yang melakukan studi quasi eksperimen tentang penerapan inkuiri dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan inkuiri mampu meningkatkan prestasi belajar siswa secara lebih baik dari pada model konvensional. Siswa yang diajar dengan inkuiri lebih aktif dan kreatif serta penguasaan terhadap kalimat tunggal lebih tinggi secara siginifikan dibanding siswa yang diajar dengan model konvensional.

Suniti (2001) melalui studinya tentang pengembangan inkuiri sosial untuk mata pelajaran IPS di SLTP Negeri I kota Cirebon menemukan bahwa pengembangan inkuiri telah berhasil merubah peran siswa yang semula berperan sebagai penerima informasi menjadi penggali atau penemu informasi dan komunikasi antar siswa terjadi multi arah. Secara khusus, hasil penelitian Suniti membuktikan bahwa: (1) munculnya sikap toleran di kalangan siswa terhadap pendapat orang lain, (2) aktivitas belajar siswa yang semula pasif berubah menjadi aktif, dan (3) meningkatnya keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.

Suhaeningsih (2001) yang melakukan studi tentang pengembangan inkuiri yang berorientasi lingkungan dalam IPA menemukan bahwa pembelajaran inkuiri telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, menanamkan sikap ingin tahu, kejujuran, percaya diri, dan rasa tanggung jawab.

Kemudian Najimudin (2004) melalui penelitiannya menemukan bahwa pembelajaran dengan pendekatan inkuiri telah berhasil meningkatkan kinerja siswa, baik pada proses maupun produk belajar. Kinerja itu ditunjukkan dalam bentuk peningkatan minat dan

motivasi belajar, tumbuhnya keberanian untuk bertanya, mengembangkan ide dan argumentasi yang terarah, aktif dan dinamis dalam berdiskusi, menyelesaikan tugas dengan baik, dan tumbuhnya rasa percaya diri yang tinggi.

Beberapa hasil penelitian yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran dengan inkuiri memiliki dampak positif terhadap kinerja atau hasil belajar peserta didik. Hasil-hasil penelitian tersebut cukup memberikan indikasi yang kuat dan bisa digunakan sebagai landasan pemikiran untuk menerapkan pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan. Dalam konteks ini, hemat penulis, pendekatan inkuiri bernilai strategis dalam rangka melengkapi dan mendukung berbagai pendekatan pembelajaran lain yang selama ini diterapkan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.

Bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, selain beberapa keuntungan positif dari penerapan inkuiri sebagai-mana telah dipaparkan di atas, pendekatan ini juga memberi kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan sejumlah pengalaman belajar secara langsung dari berbagai lembaga pendidikan Islam formal, yakni Madrasah Aliyah Negeri yang ada di kota Medan, dalam rangka mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Hal ini mengingat bahwa selama ini, pengalaman belajar secara langsung hanya mereka peroleh dari kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). Dalam kasus ini, PPL ternyata lebih banyak menyita waktu mereka berlatih mengajar di dalam kelas, sementara Kukerta selain menyita waktu yang banyak untuk pembinaan keberagamaan masyarakat juga lebih diorientasikan pada praktik mengajar di berbagai sekolah dan madrasah yang berada di

lokasi Kukerta. Baik PPL maupun Kukerta, hemat penulis, masih kurang memberi kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk mengamati dan menganalisis secara cermat proses pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai, khususnya nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam yang dipraktikkan di madrasah.

Pokok-pokok pikiran di atas menstimulasi penulis melakukan studi atau penelitian untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam melalui pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam (IPI) dengan pendekatan inkuiri. Studi tersebut dilakukan pada mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN-SU dengan pertimbang-an: (1) dilihat dari komposisi etnis dan agama, masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang plural atau heterogen. Dari sisi etnis, di wilayah ini terdapat etnis Melayu, Batak (Mandailing, Sipirok, Simalungun, Toba, Dairi, dan Karo), Jawa, Minang, Sunda, Nias, Tionghoa, Hindi, dan lain-lain. Sedangkan dari sisi agama, di wilayah ini terdapat penganut agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, aliran kepercayaan, dan penganut animisme (seperti *pelbegu* dan *pamena*). Karenanya, sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, IAIN-SU harus membekali mahasiswanya dengan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi agar kelak para alumninya dapat hidup berdampingan secara aman, damai, harmoni, dan sejahtera dalam komunitas masyarakat yang majemuk, (2) sebagai calon pendidik Muslim, mahasiswa PAI perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam agar kelak ketika menjalankan tugasnya sebagai pendidik mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam mendidik atau membelajarkan peserta didiknya. Selain kedua hal tersebut, pemilihan lokasi studi ini juga adalah dikarenakan penulis

berasal dan bertugas di Fakultas Tarbiyah IAIN-SU. Dengan demikian, di samping sangat dimungkinkan untuk mendapatkan akses melakukan penelitian dan menghimpun data, peneliti juga memiliki dasar-dasar pemahaman tentang latar budaya setempat yang diharapkan bisa memperlancar proses penelitian.

Dalam studi ini, pendekatan inkuiri diaplikasikan dalam proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam (IPI) pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN-SU. Penerapan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran mata kuliah ini hemat penulis relevan dengan tujuan pembelajaran IPI, yakni *agar mahasiswa memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan pendidikan Islam sebagai suatu sistem serta meng-aplikasikannya dalam kegiatan pendidikan* (lihat Depag RI, 1998:83).

Untuk mencapai tujuan tersebut, selain melalui kuliah tatap muka di dalam kelas, mahasiswa juga diberi kesempatan berinteraksi secara langsung dengan berbagai masalah pendidikan di luar kelas, khususnya proses pembelajaran yang dipraktikkan para guru Madrasah Aliyah Negeri kota Medan dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Melalui pembelajaran IPI dengan pendekatan inkuiri, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam.

B. Fokus Masalah

Pada latar masalah telah dikemukakan bahwa penelitian ini diarahkan pada pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam melalui pendekatan inkuiri. Karena itu, fokus penelitian ini ada pada pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam dengan

menggunakan inkuiri sebagai pendekatan dalam proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam.

Dipilihnya inkuiri sebagai pendekatan pembelajaran dimaksudkan untuk mengedepankan pola pembelajaran *student-centered* guna mengurangi atau paling tidak menyeimbangkan peran dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran IPI. Selama ini, pembelajaran IPI cenderung bersifat *lecturer-centered* sehingga tidak terjadi interaksi edukatif yang intensif, baik antara mahasiswa dengan dosen, maupun antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa dan dengan lingkungan pembelajaran. Padahal, bila ditilik dari dimensi tujuan pembelajaran IPI, maka pola pembelajaran yang idealnya dikembangkan adalah *membelajarkan* mahasiswa dalam mengembangkan materi pembelajaran IPI agar mereka memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan pendidikan Islam serta mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan pendidikan (lihat Depag RI, 1998:83). Untuk mencapai hal tersebut, maka dosen harus berupaya membelajarkan mahasiswa dan inkuiri merupakan salah satu pendekatan terbaik untuk menggerakkan, mengarahkan, dan membimbing mahasiswa dalam membelajarkan diri, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam.

Dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam, selain melaksanakan kuliah tatap muka di dalam kelas, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam juga akan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan investigasi atau inkuiri lapangan ke seluruh MAN kota Medan guna mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN

C. Rumusan Masalah

Berdasar uraian pada latar masalah dapat dipahami bahwa: pendidikan sebenarnya dapat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang dapat hidup bersama dalam suasana kebebasan, kedamaian, dan keharmonisan; namun dalam kenyataannya, ternyata pendidikan belum mampu merealisasikan peran tersebut. Hal ini terbukti dari fakta empirik mengenai kondisi bangsa Indonesia, baik pra maupun pasca era reformasi sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, (2) Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam sesungguhnya bertanggung jawab dalam menciptakan peserta didik dan *output* pendidikan yang mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi, khususnya nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam; namun pembelajaran yang selama ini dipraktikkan di Fakultas Tarbiyah IAIN-SU belum begitu kondusif bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam, (3) inkuiri merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memberi kemungkinan bagi mahasiswa untuk bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lapangan. Karenanya, pendekatan ini relevan digunakan untuk mencermati dan menganalisa nilai-nilai demokrasi pendidikan yang dipraktikkan dalam pembelajaran di MAN kota Medan guna mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam.

Berdasar hal di atas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam melalui pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam (IPI) dengan menjadikan mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN-SU sebagai subjek studi. Berdasar fokus tersebut, maka masalah penelitian ini adalah *mengembangkan nilai-nilai demokrasi*

pendidikan Islam melalui pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam (IPI) pada mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN-SU. Secara rinci, rumusan masalah di atas dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan pokok berikut ini:

1. Apa yang dilakukan dosen pengampu IPI dalam membelajarkan mahasiswa untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam melalui pendekatan inkuiri dalam proses pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam ? Masalah-masalah yang berkaitan dengan hal ini meliputi: (a) apa yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam proses pelaksanaan inkuiri ke madrasah untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam, (b) aktivitas apa saja yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam keseluruhan siklus pembelajaran kelas untuk membahas dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam, dan (c) bagaimana dosen mengevaluasi keseluruhan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan mahasiswa.
2. Dalam konteks demokrasi pendidikan Islam, nilai-nilai instrumental apa saja yang ditemukan dan berhasil dikembangkan mahasiswa, baik melalui inkuiri lapangan ke seluruh MAN kota Medan maupun pembelajaran kelas yang mecakup: (a) nilai-nilai yang dipraktikkan guru dalam proses pembelajaran, dan (b) nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam yang berhasil dikembangkan mahasiswa dalam keseluruhan pembelajaran.
3. Bagaimana respon atau tanggapan guru, dosen dan mahasiswa tentang keseluruhan proses pembelajaran dan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam yang dikembangkan melalui pembelajaran IPI dengan pendekatan inkuiri ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pendekatan inkuiri dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam melalui pembelajaran mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Karenanya, produk akhir dari penelitian ini adalah model pendekatan inkuiri untuk pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam melalui pembelajaran IPI. Untuk menyusun model tersebut diperlukan data tentang: (a) tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan model pendekatan inkuiri, (b) materi pembelajaran dan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam yang dikembangkan dalam keseluruhan proses pembelajaran, (c) aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam dengan pendekatan inkuiri, (d) nuansa atau suasana yang dikembangkan dalam keseluruhan pembelajaran, (e) sarana dan fasilitas, yaitu menyangkut sumber bahan dan alat yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran, (f) evaluasi atau penilaian yang digunakan dosen untuk mengetahui keberhasilan penerapan pendekatan inkuiri melalui pembelajaran IPI dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam, dan (g) tanggapan guru, dosen, dan mahasiswa terhadap keseluruhan proses pembelajaran dan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam yang dikembangkan melalui pembelajaran IPI dengan pendekatan inkuiri.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kontribusi keilmuan bagi Pendidikan Umum. Pada tataran konseptual, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sum-

bangan pemikiran dalam mengkonstruk atau menyusun muatan nilai yang idealnya tercakup pada program Pendidikan Umum. Kemudian pada tataran praktikal, model yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan bisa membantu proses dan cara-cara melakukan pembelajaran pada pelaksanaan Pendidikan Umum.

2. Menambah wawasan dan keterampilan para praktisi pendidikan, khususnya di Fakultas Tarbiyah IAIN-SU Medan, untuk menerapkan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran, khususnya dalam mengembangkan nilai-nilai dan memperluas pengalaman belajar mahasiswa.
3. Membantu dan menstimulasi mahasiswa untuk bersedia mengembangkan berbagai pendekatan pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan upaya membelajarkan diri secara aktif, kreatif, dan partisipatif dalam mempelajari seluruh topik perkuliahan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, baik dalam konteks pembinaan dosen maupun mahasiswa dalam menanamkan dan mengembangkan suatu nilai, khususnya nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam di kalangan mahasiswa.
5. Bagi kegiatan penelitian sejenis, khususnya di lingkungan perguruan tinggi Islam, penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi awal dan telaah kepustakaan untuk melakukan penelitian lanjutan.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan menghindari kesalah pahaman dalam mempersepsi beberapa konsep, maka perlu dikemukakan definisi operasional yang menyangkut istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nilai-Nilai Demokrasi Pendidikan Islam

Nilai merupakan standar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan kualitas sesuatu (orang, objek, gagasan, tindakan, dan situasi) sehingga hal-hal tersebut bisa dikatakan baik, berharga, dan layak, atau tidak baik, tidak berguna dan hina, atau segala sesuatu yang berada di antara titik ekstrim keduanya. Sementara demokrasi pendidikan adalah aktualisasi nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, kemajemukan, dan toleransi, sebagai landasan atau asas dalam seluruh aktivitas dan praktik pembelajaran.

Istilah nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam diartikan sebagai standar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk menen-tukan suatu aktivitas pembelajaran dalam pendidikan sehingga ia dapat disebut atau dikelompokkan sebagai aktivitas atau perilaku yang demokratis. Aktivitas atau perilaku yang demokrasi itu ditunjukkan melalui aktualisasi atau aplikasi nilai-nilai demokrasi secara konkrit dalam proses pembelajaran. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam dalam penelitian ini merupakan nilai-nilai yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits. Karenanya, pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam dalam penelitian ini dilakukan dalam kerangka pengamalan ajaran Islam, khususnya dalam aspek penegakan *al-Akhlaq al-Karimah*. Nilai-nilai

demokrasi pendidikan Islam yang dikembangkan hanya dibatasi pada nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi, sebagai fundamen atau dasar-dasar bagi aktivitas pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nilai-nilai yang dimaksud tersebut termasuk dalam kawasan nilai-nilai moral dasar sosial *(basic societal moral values)* yang bersifat intrinsik yang nilai-nilai instrumentalnya akan dikembangkan oleh mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN-SU melalui pembelajaran IPI dengan pendekatan inkuiri.

2. Pendekatan Inkuiri

Secara etimologi, pendekatan berarti: (1) suatu proses, perbuatan, cara mendekati atau (2) usaha dalam rangka aktivitas penelitian, untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti, atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian (Depdiknas, 1991:192). Sedangkan dalam konteksnya dengan pembelajaran, Djahiri dan Wahab (1996:55) memaknai pendekatan atau *approach* sebagai pola berpikir atau cara menyikapi sesuatu. Karena itu, bila dikaitkan dengan program pembelajaran, maka pendekatan adalah cara berpikir apa atau mana yang harus kita gunakan pada saat kita akan mengembangkan program atau bahan materi pelajaran. Pola berpikir sangat menentukan makna dari sesuatu, ke arah mana sesuatu itu akan kita kembangkan.

Kemudian inkuiri adalah proses pembelajaran yang mensyaratkan adanya interaksi yang mendalam antara peserta didik dengan pendidik, bahan, isi, dan lingkungan pembelajaran (lihat Orlich et. al., 1994:252). Menurut Hamalik (2001:219), dalam inkuri seorang bertindak sebagai seorang ilmuan, melakukan eksperimen,

dan melakukan proses mental inkuiri sebagai berikut: (a) mengajukan pertanyaan tentang gejala alami, (b) merumuskan masalah, (c) merumuskan hipotesis, (d) merancang pendekatan investigatif, (e) melakukan eksperimen, (f) mensintesa pengetahuan, dan (g) memiliki sikap ilmiah, seperti objektif, ingin tahu, keterbukaan, menginginkan dan menghormati model-model teoritis, serta bertanggung jawab.

Sedangkan *The inquiry approach is more focused on using and learning content as a means to develop information-processing and problem-solving skills. The system is more student centered, with the teacher as a facilitator of learning* (http://www.thirteen.org./edonline /concept2class/month6/index_sub2.html). Karena itu, dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan pendekatan inkuiri adalah proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan mengikuti prosedur atau langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: (1) *defining purpose for inquiry,* yakni merumuskan tujuan pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Selain memperjelas permasalahan, yakni pengembangan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam, dosen dan mahasiswa juga memperjelas tugas-tugas yang akan dilakukan dalam keseluruhan pembelajaran. Artinya, nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam dan pendekatan pembelajaran diterjemahkan dalam istilah-istilah yang bisa dipahami atau dilakukan mahasiswa *(manageble).* (2) *developing a tentative answer,* yakni mencari jawaban tentatif tentang nilai-nilai intrinsik demokrasi pendidikan Islam untuk mempermudah proses pengembangan nilai-nilai instrumentalnya, (3) *testing the tentative answer,* yakni dengan melakukan inkuiri lapangan untuk mencari solusi permasalahan, (4) *drawing a conclusion,* yaitu melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan berdasar informasi dan data

yang telah dikumpulkan dalam *small group discussion*, (5) *applying the conclusion to new data or generalization*, yakni mendiskusikan temuan atau kesimpulan yang telah dibuat dalam perkuliahan kelas *(class discussion)* untuk menganalisis nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam yang ditemukan berdasar data, fakta, pengalaman personal, dan teori-teori pendidikan Islam yang relevan.

3. *Proses Pembelajaran Ilmu Pendidikan Islam*

Proses pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh aktivitas yang dilakukan dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam (IPI) dalam membelajarkan mahasiswa jurusan PAI Fakultas Tarbiyah IAIN-SU untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pendidikan Islam. Seluruh aktivitas yang dilakukan dosen dalam membelajarkan mahasiswa tersebut dilakukan melalui pendekatan inkuiri di mana para mahasiswa tidak hanya dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran kelas, tetapi juga dibimbing dan diaktifkan untuk belajar di luar kelas, baik dengan cara melakukan telaah kepustakaan, inkuiri lapangan, diskusi dalam kelompok, dan presentasi atau seminar kelas. Dalam proses pembelajaran, sebagaimana disarankan Beyer (1971) dan Djahiri (2004), dosen berfungsi sebagai fasilitator yang membelajarakan mahasiswa, baik dalam mengarahkan, membimbing dan menggerakkan aktivitas pembelajaran. Selain itu, sebagaimana dikemukakan Orlich et. al., (1994), dosen pengampu mata kuliah IPI juga berperan sebagai *great clarifier*, yaitu pemberi klarifikasi terhadap seluruh proses dan hasil-hasil pembelajaran yang dilakukan mahasiswa.